

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia mulai diperhitungkan menjadi salah satu destinasi *MICE* (*meeting, incentive, conference and exhibition*) di dunia. Hal ini terbukti dengan digelarnya berbagai aktivitas *MICE* di beberapa kota besar di Indonesia. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menetapkan 16 kota yang siap jual untuk pasar utama aktivitas *MICE* di tanah air. Destinasi itu antara lain Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Makassar, Batam, Medan, Manado, Padang, Palembang, Balikpapan, Bintan, Semarang, dan Lombok.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa usaha pariwisata meliputi, antara lain : penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Yang dimaksud dari pasal tersebut yaitu *MICE* adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional. Dan dengan demikian sesuai dengan nomenklatur yang digunakan dalam Undang-Undang Pariwisata No. 10 Tahun 2009, di Indonesia istilah

---

<sup>1</sup> Indonesia Promosikan 16 Destinasi Wisata *MICE* di Frankfurt diakses dalam <http://www.beritasatu.com/destinasi/430113-indonesia-promosikan-16-destinasi-wisata-mice-frankfurt.html> pada tanggal 19 Juni 2018 pukul 12:00 WIB

*MICE* dikenal dengan usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (PIKP).

Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, tidak dapat dipisahkan dari mata rantai usaha di bidang kepariwisataan dan berbagai sektor usaha lainnya. Penyelenggaraan PIKP selalu melibatkan banyak sektor usaha atau industri dan banyak pihak, yang menimbulkan pengaruh ekonomi berlipat ganda (*multiplier effect*) yang menguntungkan dan dapat dirasakan oleh banyak pihak, khususnya karena daya pengeluaran *financial* (*spending power*) dari segmen usaha jasa penyelenggaraan PIKP yang tinggi, sekitar 8-10 kali wisatawan biasa. Di antara pihak yang potensial mendapatkan keuntungan besar bisnis jasa penyelenggaraan PIKP adalah percetakan, hotel, perusahaan *souvenir*, biro perjalanan wisata, transportasi, *professional conference organizer (PCO)*, usaha kecil dan menengah (UKM) dan *event organizer*.<sup>2</sup>

Dikutip dari [www.bisniswisata.co.id](http://www.bisniswisata.co.id) bahwa pemerintah menempatkan wisata PIKP sebagai produk unggulan pariwisata nasional karena kontribusinya terhadap kunjungan wisatawan mancanegara maupun peningkatan perjalanan wisatawan nusantara cukup besar. PIKP masuk dalam lima teratas (*top five contributors*) dalam mendatangkan wisata mancanegara, selain wisata belanja dan kuliner; wisata heritage&religi; wisata bahari; dan wisata olahraga. Menteri

---

<sup>2</sup> Junaedi. Jurnal. 2016. Strategi pengembangan bisnis *MICE* untuk mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota *MICE*.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengamanatkan agar pertumbuhan PIKP ditingkatkan dari 5% menjadi 10% pada 2019 mendatang.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu destinasi PIKP di Indonesia, Kota Padang telah menyelenggarakan aktivitas PIKP yang berskala nasional maupun internasional. Setiap tahunnya diagendakan *event* “*Tour de Singkarak*” yang melibatkan beberapa Negara di dunia. Agenda tahunan lainnya adalah “*Padang Fair*” yang diselenggarakan beriringan dengan ulang tahun Kota Padang. Selain itu pada tahun 2016 *event* PIKP di Kota Padang meningkat drastis dengan diadakannya agenda penting berskala Internasional di Kota Padang yang diselenggarakan oleh TNI AL yakni *Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK)*, *15<sup>th</sup> Western Pacific Naval Symposium (WPNS)*, dan *the Internasional Fleet Review (IFR)*. Seakan tidak ingin kehilangan momentum bersejarah di Kota Padang, Kementerian Luar Negeri RI dan Sekretariat IORA juga mengadakan “*The 3<sup>rd</sup> Indian Ocean Dialogue*” atau Dialog ke 3 Negara-Negara Pesisir Samudera Hindia yang tergabung dalam organisasi IORA.<sup>4</sup>

Dan untuk tahun 2017 Pemerintah Kota Padang telah menggelar 15 kegiatan besar sepanjang tahun 2017, dan beberapa diantaranya merupakan *event* PIKP ; Pertemuan Ulama se-Asia Tenggara, Minangkabau Halal *Tourism Fair*, Musyawarah Besar Dewan Ekonomi Syariah, Festival Anak Nagari, Pendirian dan Pengembangan Industri Kreatif Pariwisata, Lomba Selaju Sampan, Festival

---

<sup>3</sup> Kontribusi Wisata *MICE* Indonesia Diproyeksikan US\$2,5 Miliar diakses <http://www.google.com/amp/bisniswisata.co.id/kontribusi-wisata-mice-indonesia-diproyeksikan-us-25-miliar/amp> pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 10:00 WIB

<sup>4</sup> Padang Kota *MICE*, 3 Agenda Internasional Digelar diakses dalam <https://kinciakincia.com/berita/2627-padang-kota-mice-3-agenda-internasional-digelar.html> pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 11:20 WIB

Siti Nurbaya, Pemilihan Uni dan Uda Kota Padang, Lomba Qasidah Lasqi se-Indonesia, Festival *Dragon Boat* Internasional, Festival Kuliner Minangkabau.<sup>5</sup>

Kota padang merupakan salah satu daerah tujuan wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, hal itu tentu saja berdasarkan kepada fasilitas yang dinilai cukup lengkap untuk mendukung kegiatan itu. Banyaknya peserta seminar, konferensi, pameran ataupun kegiatan lainnya berskala nasional maupun internasional yang digelar di Kota Padang menunjukkan bahwa posisi Kota Padang sebagai salah satu daerah pariwisata berbasis PIKP menjadi kuat.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat dan menjadi salah satu tujuan wisata, Kota Padang terus memperbaiki dan membangun berbagai fasilitas baru yang dibutuhkan oleh wisatawan. Bertambahnya hotel, restaurant, pusat perbelanjaan, dan destinasi wisata tentu menjadi faktor pendukung para wisatawan untuk merasa nyaman berkunjung ke Kota Padang. Selain itu, kondisi kota Padang yang aman pasca gempa 2009 menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengadakan acara skala nasional, regional, maupun internasional, seminar, pameran, pertemuan, dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti ini banyak pengusaha pariwisata yang menyambut optimis dan mendukung berbagai kegiatan dalam kerangka bisnis jasa penyelenggaraan PIKP.

---

<sup>5</sup> Ini Kalender Wisata Padang Tahun 2017 diakses dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/travel/read/2017/03/01/223000827/ini.kalender.wisata.padang.tahun.2017> diakses pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 08:20 WIB



Dengan semua faktor yang telah mendukung kegiatan PIKP di Kota Padang, maka dari itu dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir banyak muncul perusahaan yang membidangi usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang dikenal dengan istilah *PCO* (*Professional Conference Organizer*).

*PCO* sebagai sebuah perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam penanganan *congress*. Perusahaan dalam PIKP ini bertindak sebagai sebuah konsultan bagi panitia pelaksana, dan melaksanakan keputusan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam sebuah *event*. Perusahaan ini bertindak sebagai sebuah konsultan bagi panitia pelaksana, dan melaksanakan keputusan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam mengorganisir sebuah *event*.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah Kota Padang dalam menciptakan iklim usaha pariwisata dalam bidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang kondusif serta kompetitif. Dalam kaitannya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan serta kewajiban untuk merencanakan, memanfaatkan serta mengendalikan setiap usaha jasa pariwisata di daerahnya masing-masing.

Dengan adanya kebijakan mengenai tanda daftar usaha pariwisata pada hakikatnya memberikan jawaban atas kebutuhan pedoman dalam kegiatan pengelolaan, hal ini ditunjukkan untuk memberikan arahan bagi para aparatur

---

<sup>6</sup> Fabella Anjani Hidayat. Jurnal. 2014. *Business Startup* Jasa Penyelenggaraan *MICE* (*meeting, incentive, conference, and exhibition*) PT. Diploma Arthakama.

pemerintah yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha jasa pariwisata dalam upaya mengoptimalkan potensi yang ada pada bidang pariwisata serta untuk meminimalkan konflik-konflik dan penyimpangan yang mungkin terjadi akibat perbedaan kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, maka dirumuskannya suatu kebijakan yang dijadikan pedoman tindakan bagi pengusaha pariwisata sebagai komponen pendukung pariwisata dalam pengelolaan pariwisata Kota Padang yaitu Peraturan Daerah Kota Padang No. 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Proses Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kepariwisata, Sarana Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang lebih menjelaskan aturan bagi pengusaha dan serta bagi aparatur pemerintahan dalam mengawasi pelaksanaan industri sektor pariwisata di Kota Padang.

Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan pengusaha pariwisata sebelum melakukan aktivitas usaha pariwisata. Dalam pasal 2 disebutkan :

- 1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib melakukan pendaftaran usahanya kepada Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang.

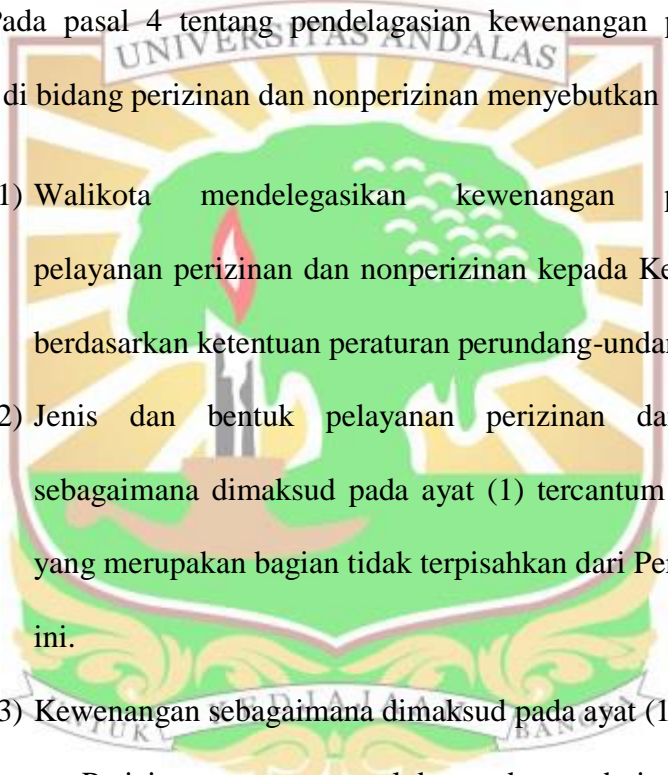
- 2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal Pengusaha Perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ingin mendaftarkan usaha pariwisatanya, SKPD wajib menerima pendaftarannya.

Sebelumnya kewenangan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan masih berdiri sendiri-sendiri sebagai lembaga teknis dalam bentuk Kantor, yaitu Kantor Penanaman Modal Kota Padang dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang. Namun kemudian pada akhir tahun 2012, kedua Kantor tersebut bergabung menjadi satu yaitu menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang.

Pada Tahun 2015, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) berganti nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada tahun 2016 disahkan nya Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Proses Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kepariwisata, Sarana Kesehatan, Sosial dan

Ketenagakerjaan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), dimana Perwako tersebut masih berlaku sampai sekarang.

Lalu pada tahun 2017 BPMPTSP berganti nama menjadi DPMPTSP melalui Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang. Pada pasal 4 tentang pendelagasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan menyebutkan :

- 
- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Jenis dan bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    - a. Perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis diberikan oleh OPD teknis terkait;
    - b. Menetapkan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin dan nonperizinan kepada pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Memberikan kelancaran proses perizinan dan nonperizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
  - e. Menandatangani seluruh perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan termasuk perubahan dan perpanjangan izinnya;
  - f. Menolak atau menyetujui permohonan perizinan dan nonperizinan;
  - g. Membentuk tim teknis dengan anggota terdiri dari perangkat daerah atau unit kerja terkait melalui koordinasi Assisten terkait; dan
  - h. Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Walikota secara berkala.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memperhatikan :
- a. Peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah yang mengatur perizinan dan nonperizinan dimaksud;
  - b. Standar, norma, pedoman, dan criteria yang ditetapkan, serta kebijakan pemerintah daerah;
  - c. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran, pelaksanaan tugas pemerintah, dan pembangunan;
  - d. Standar pelayanan minimal; dan

e. Rencana tata ruang wilayah.

- (5) Penyelenggaraan pendelegasian wewenang akan dilaksanakan secara bertahap jika sarana dan prasarana penunjang sudah tersedia secara memadai.

Yang dimaksud dalam pasal tersebut mengenai OPD teknis terkait yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang sebagai tim teknis yang berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam memberikan rekomendasi teknis untuk izin tanda daftar usaha pariwisata.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012, DPMPTSP Kota Padang memiliki standar pelayanan tanda daftar usaha pariwisata yang di dalamnya terdapat persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya pelayanan dan produk pelayanan.

Berikut persyaratan yang harus dilengkapi pemohon (pengusaha) TDUP antara lain :

1. Fotokopi surat izin gangguan
2. Fotokopi KTP
3. Daftar isian (disediakan oleh DPMPTSP)
4. Fotokopi IMB (untuk hotel)
5. Denah lokasi tempat usaha
6. Fotokopi akta pendirian perusahaan berbadan hukum
7. Fotokopi paspor/kitas/IMTA (bagi non WNI)

8. Surat pernyataan dan keabsahan dokumen
9. Fotokopi NPWP perusahaan
10. Pas photo 3x4 (dua lembar)
11. Dokumen lingkungan hidup

Setelah itu terdapat prosedur yang harus dilewati oleh pemohon (pengusaha) dalam pendaftaran tanda usaha pariwisata antara lain :

1. Mengambil nomor antrian
2. Mengisi formulir dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas
3. Menunggu hasil verifikasi oleh petugas
4. Mengambil dan menerima tanda bukti pendaftaran
5. Proses izin sesuai waktu pelayanan
6. Mengambil izin di loket hasil dengan menunjukkan bukti pendaftaran

Dan waktu pelayanan selama 14 hari kerja dan tidak dipungut biaya apapun dan si pemohon (pengusaha) dalam pendaftaran izin tanda daftar usaha pariwisata.

Selain standar pelayanan, DPMPTSP juga memiliki standar operasional pelayanan (SOP) izin tanda daftar usaha pariwisata yang terdapat dalam Gambar 1.1 berikut :

**Gambar 1.1**  
**Standar Operasional Pelayanan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata**

Berikut ini Rekapitulasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (PCO/EO) di Kota Padang Tahun 2014-2018 :

**Tabel 1.1**

**Rekapitulasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (PCO/EO) di Kota Padang Tahun 2014-2018**

<b>N O</b>	<b>TAHUN 2014</b>	<b>TAHUN 2015</b>	<b>TAHUN 2016</b>	<b>TAHUN 2017</b>	<b>TAHUN 2018</b>
1	CV. CITYKU	PT. PRESMA JAYA PROMOSINDO	PT. TEWEN GHAZA MELTA	PT. INDOSINERGI UTAMA MANDIRI	PT. HORE KENCANA INDONESIA
2	CV. EN BEE	PT. NAGA PUTRA SATRIA	PT. MEDIA INDOTAMA EXPO	PT. SAFARI GUMANDI MULTILINDO	PT. EMIRIZAN SURYA KENCANA
3	CV. BOGA SELERA UTAMA	PT. AKA SOLUSI TEKNOLOGI	PT. DETEKSI ORGANIZER GROUP	PT. HESA SHAKA KAMILA	PT. ARASY MULIA UTAMA
4		PT. TRECO MEDIA KREATIF	PT. GEMA MEDIA PROMOSINDO	PT. LIMPAPAH RUMAH GADANG	PT. PESONA GLOBAL MULTIKARYA
5		PT. EKA INDAH BERDIKARI	PT. MEDIA JAYATJIPTA	PT. EREMPAT SYAHER KARYA	
6		PT. BIANGLALA ADVENTURE INDONESIA	PT. ARMANBRAV TRI INTERNASIONAL	PT. SINGGALANG PRO KOMUNIKASI INDONESIA	
7		PT. MULTI TALENTA AGUNG	PT. SINGGALANG PRO KOMUNIKASI INDONESIA	PT. EMTE PROMOSINDO UTAMA	
8			PT. EDITOR PROMOSINDO SUMBAR	PT. ARADANBI PILAR	



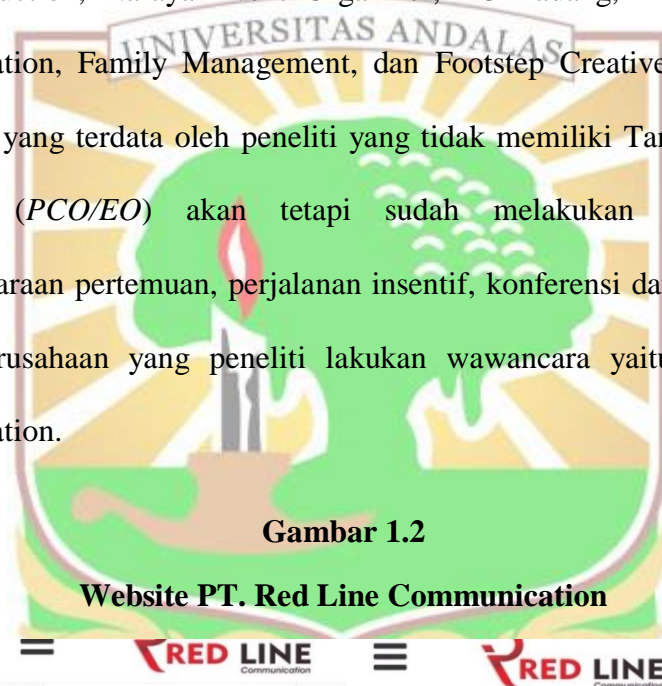
				GARUDA	
9			PT. OCTAVIANY PURNAMA WISATA	PT. SELARAS KARYA RAMBE	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, 2018

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan izin usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*PCO/EO*) di Kota Padang pada tahun 2014 ada 3 perusahaan yang mendapatkan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata jasa penyelenggaraan PIKP, selanjutnya pada tahun 2015 meningkat dengan jumlah perusahaan yang mendapatkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebanyak 7 perusahaan, dan pada tahun 2016 ada 9 perusahaan yang mendapatkan Izin TDUP, dan jumlah yang sama yaitu 9 perusahaan yang mendapatkan Izin TDUP jasa penyelenggaraan PIKP pada tahun 2017. Lalu pada tahun 2018 dalam kurun waktu bulan Januari sampai Agustus hanya terdapat 4 perusahaan yang mendapatkan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Jadi total perusahaan yang sudah terdaftar dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*PCO/EO*) yaitu 30 perusahaan. Dengan perkembangan usaha yang ada diharapkan atmosfer persaingan positif di antara pengusaha untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan.

Namun, yang peneliti temukan terdapat beberapa *PCO/EO* yang bergerak dalam usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang belum terdaftar akan tetapi sudah menjalankan usaha jasa penyelenggaraan PIKP bertahun-tahun lamanya. Dan perusahaan yang belum

mendapatkan TDUP jasa penyelenggaraan PIKP inipun sudah melakukan promosi di media sosial bahwa mereka menyediakan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau yang lebih dikenal jasa penyelenggaraan *MICE*. Perusahaan tersebut antara lain ; PT. Red Line Communication, Navigasi Indosolusi, KeRyou Production, V-Pro Event Organizer, Bizzpro Indonesia, Lukman Enterprise Raden Saleh, Darwin WF, Mega Production, Naraya Event Organizer, EO Padang, Proklamator Muda Communication, Family Management, dan Footstep Creative. Berarti ada 13 perusahaan yang terdata oleh peneliti yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (*PCO/EO*) akan tetapi sudah melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. Salah satunya perusahaan yang peneliti lakukan wawancara yaitu PT. Red Line Communication.



Maka dari itu (MICE) menjadi salah satu layanan kami. Untuk mendapatkan MICE terbaik diperlukan perencanaan yang matang dan di sertai oleh kreativitas yang tinggi. Kami akan selalu menjadi bagian dari tim anda dengan selalu bekerja profesional dan terkoordinasi dengan baik.

Apabila anda mencari jasa EO untuk MICE di Padang, maka anda dapat menghubungi REDLINE COMMUNICATION. Yang telah mempunyai sertifikasi dan memiliki pengalaman mengadakan event-event besar.

**RED LINE**  
Communication

**RED LINE**  
Communication

**Contac Us**

**REDLINE COMUNICATION**  
(Event Organizer & Brand Communication)

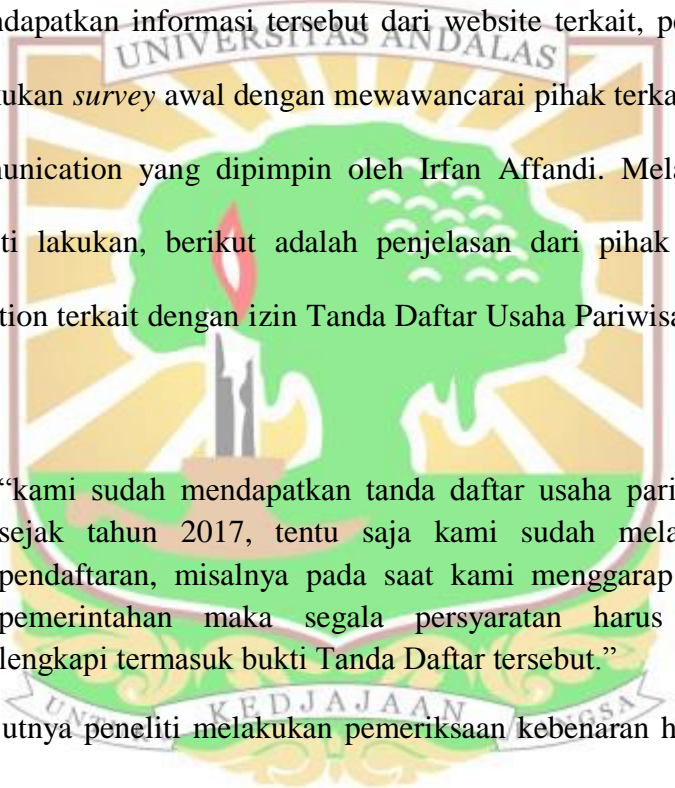
IRFAN AFFANDI  
(Business Contact)  
Office : Jl.Prof. Dr. Hamka No 10 B { Depan Basko Mall }  
Phone Office : 0751 447392  
Email Office : redlinecommunication@gmail.com  
Contact Person : 0811 66 35 28 / 0811 66 81 072  
Pin BB : 54F8DAA6  
Area Covered : All Sumatera - Indonesia

visit us on

Sumber : [www. redlinecommunication.com](http://www.redlinecommunication.com) diakses pada tanggal 10

Juli 2018 pukul 09:00 WIB

Pada gambar 1.2 merupakan *sounding*/promosi yang dilakukan oleh PT. Red Line Communication pada *website* yang mereka miliki, dengan jelas bawa PT. Red Line Communication melakukan promosi dibidang jasa usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran. Setelah mendapatkan informasi tersebut dari website terkait, peneliti mencoba untuk melakukan *survey* awal dengan mewawancarai pihak terkait yaitu PT. Red Line Communication yang dipimpin oleh Irfan Affandi. Melalui wawancara yang peneliti lakukan, berikut adalah penjelasan dari pihak PT. Red Line Communication terkait dengan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang mereka miliki <sup>7</sup> :



“kami sudah mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata sejak tahun 2017, tentu saja kami sudah melakukan pendaftaran, misalnya pada saat kami menggarap *event* pemerintahan maka segala persyaratan harus kami lengkapi termasuk bukti Tanda Daftar tersebut.”

Selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kebenaran hasil wawancara tersebut kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, apakah PT. Red Line Communication telah mendapatkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari DPMPTSP Kota Padang. Akan tetapi, berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa PT. Red Line Communication belum memiliki izin TDUP. Hal ini tentu saja bertolak belakang

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Irfan Affandi sebagai pimpinan PT. Red Line Communication tanggal 12 Juli 2018 pukul 14:00 WIB

dengan apa yang dijelaskan oleh pihak PT. Red Line Communication yang mengaku telah memiliki izin TDUP sejak tahun 2017.

PT. Red Line Communication ini berdiri sejak tahun 2008 dan sudah beberapa kali menjadi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi di Kota Padang, antara lain ; Kalsi *Gathering* Semen Indonesia Group, Pertamina *Module Day* SPC HRO 2017, Sosialisasi Pembiayaan Syariah Kementrian Koperasi&UKM Republik Indonesia, dan Debat Publik Walikota Padang 2018.

Dengan banyaknya *event* PIKP yang sudah diselenggarakan oleh PT. Red Line Communication, apalagi terdapat *event* Pemerintah yang juga diselenggarakannya, maka dapat dikatakan bahwa PT. Red Line Communication secara illegal melakukan usaha jasa penyelenggaraan PIKP karna pada dasarnya PT. Red Line Communication ini tidak memiliki izin TDUP yang seharusnya menjadi salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh *PCO/EO* dalam menyelenggarakan *event* PIKP tersebut.

Di dalam penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, *PCO/EO* tidak hanya bekerja sendiri dalam penyelenggaraan PIKP tersebut, *PCO/EO* membutuhkan kerjasama dengan bidang usaha pariwisata lainnya yang juga merupakan bagian dari penyelenggaraan PIKP. Dalam penyelenggaraan PIKP, terdapat bagian perjalanan insentif. Perjalanan insentif ini biasanya diserahkan oleh *PCO/EO* dengan bentuk kerjasama kepada biro perjalanan usaha atau yang lebih dikenal *tour and travel*. Di Kota Padang



perkembangan tour and travel juga meningkat pesat seiring dengan perkembangan pariwisata di Kota Padang.

Berikut Rekapitulasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Biro

Perjalanan Wisata (Tour and Travel) di Kota Padang Tahun 2014-2018 :

**Tabel 1.2**

**Rekapitulasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha  
Pariwisata (Tour and Travel) di Kota Padang Tahun 2014-2018**

NO	2014	2015	2016	2017	2018
1	PT. Anatur Indonesia	PT. Jambak Vyga Kencana	PT. Raudhoh Travelindo	PT. Partner Wisata Indonesia	PT. Togat Nusa Retreat
2	PT. Juita Calistya	PT. Abyan Danish Tour and Travel	PT. Kasang Sei Bangek (KASEBA) Tour and Travel	PT. Ikarsa Pesona Nusantara	PT. Fikrian Jasa Anugerah
3	PT. Etno&Geo Tour	PT. Andalas Zahana Tour	PT. Rismaya Arsalokawisata	PT. Fajar Anggrek Alam Mandeh	PT. Assalam Kaffah Tour
4	PT. Pantara	PT. Biro Perjalanan Wisata Raja Indah Wisata	PT. Wisata Al-Mabrun Usmaniah	PT. Sumatera and Beyond Tours	PT. Sugesti Wisata Mandiri
5	PT. Sedia Pratama Kencana	PT. Habsya Tour and Travel	PT. Rajo Batuah Resort Indonesia	PT. Batavia Transasia	PT. Biro Perjalanan Wisata Debe Mustika
6	PT. Putri Safira Wisata	PT. Sovijon Jaya Wisata	PT. Armada Jaya Wisata	PT. Sinar Ventura Indonesia	PT. Azhar Mitra Utama
7	PT. Uda Cs Holidays Indonesia	PT. Dempo Yanyu Travel	PT. Biro Perjalanan Wisata Aprilya Darma Wisata	PT. Madani Insan Mandiri Barokah	PT. Rihlah Alamabrur Haramain
8	PT. Asiana Timur Jaya	PT. T. G Sumbarindo Wisata	PT. Star Victory Creation	PT. Sukses International Tour and Travel	PT. Kreasi Tunas Nusantara
9	PT. Laju	PT. Piramida	PT. Kanda	PT.	PT. Ombak

	Minang Travel	Asa Wisata	Smiling Wisata	Limpapeh Rumah Gadang	Surf dan Travel Indonesia
10	PT. Bravo Habelnusa Wisata	PT. Raudoh Mandiri Ausindo	PT. Selayan Group Tour	PT. Indojaya Dian Wisata	PT. Sony Samudra Wisata
11	PT. Permata Fansa Gemilang	PT. Vector Internasional Trust Holiday	PT. Sianok Indah Holiday	PT. Harta Karun	PT. Sukma Jaya Wisata
12	PT. Nadine Duta Wisata	PT. Mata Angin Jaya	PT. Mufidah Raya Tour	PT. Bangkit Mandalacakra Tourindo	PT. Atta Tiga Saudara
13	PT. Satta Kencana Mandiri	PT. Rindu Baitullah Padang	PT. Duta Harby Utama	PT. Razelindo Kharisma Dinayu	PT. Glorie Cuaca Mandiri
14	PT. Azra Ranah Minang	PT. Kurnia Rilah Wisata	PT. Mandiri Karya Wisata	PT. Nagari Smart Tour and Travel	PT. Cahyo Ombak Mentawai
15	PT. Anno Wisata Selera	PT. Karya Indah Samudera	PT. Biro Perjalanan Wisata Keumala Sarana Wisata Keumala	PT. Megatrust Surf Travel	PT. Setia Darma Wisata
16	PT. Wibawa Karya Jaya	PT. Azhar Mitra Utama	PT. Bellaform Pesiar Ventour	PT. Alzahira Zultie Wisata	PT. Alzahira Zazu Wisata
17	PT. Kudus Jaya Wisata	PT. Rimba Eko Wisata	PT. Govana Nusantara Fam	PT. Kemilau Nuansa Panorama	PT. Alam Malindo Wisata
18	PT. Andalan Insani	PT. Uma Ombak Mentawai	PT. Joe Penthan Wisata	PT. Pelangi Sumberindo Wisata	PT. Cordoba Berkah Mandiri
19	PT. Glorie Mandiri	PT. Wisata Jelajah Nusantara	PT. Rudi Travel	PT. Raja Tourindo	PT. Andara Indah Wisata
20	PT. Bonai Kartika Nindyatama	PT. Fahmi Utama	PT. Deska Prima	PT. Ermi Armay Tours and Travel	PT. Ero Prima Wisata
21	PT. Glamour Cakka Wisata	PT. Biro Perjalanan Wisata AL AMIN	PT. Telos Island Adventure	PT. Hela Najwa Amerausia	PT. Rashindo Karya Mandiri
22	PT. Jejef Ihram	PT. Yobana Bindo Perkasa	PT. Biro Perjalanan	PT. Jalur Angkasa	PT. Sahabat Wisata Sejati

	Wisata	Travel	Wisata Phionix Jaya Mandiri	Primadinamik	
23	PT. Rajima Rahim Mandiri	PT. Almadinah Avi Wisata	PT. Syukma Groups Utama	PT. Samudera Indah Hibala	PT. King Millenium Surfcharters
24	PT. Mitra Sumatera Permai		PT. Uni Tour Travel	PT. Laguna Rama Wisata	PT. Azhar Mitra Utama
25	PT. Muhammad Adnan Wisata		PT. Bumi Minang Pertiwi	PT. Bintang Samudera Mentawai	PT. Armindo Jaya Tour
26	PT. Salina Jaya Mandiri		PT. Cordoba Berkah Mandiri	PT. Mabers	PT. Arrumi Berkah Wisata
27	PT. Deska Prima		PT. Ghazali Uthi Abadi	PT. Badran Teguh Sentosa	PT. Alzahira Zazu Wisata
28	PT. Rezna Terus Adikurnia		PT. Raja Tourindo	PT. Ghina Holiday Indonesia	
29	PT. Sarah Abdillah Allugman		PT. Emirizan Surya Kencana	PT. Awana Wisata Nusantara	
30	PT. Sero Alam Holiday		PT. Silversilk Tour and Travel	PT. Pulu Ombak Indah	
31	PT. Flora Cipta Mandiri		PT. Adelia Panorama Wisata	PT. Monamasta Wisata Mandiri	
32	PT. Beta Mandiri Wisata		PT. Panorama Puncak Lawang	PT. Zimzabe	
33	PT. Zuro Wisata Indonesia		PT. Penjuru Wisata Negeri	PT. Asia Wisata Indonesia	
34	PT. Alam Surfindo Jaya		PT. Marnisya Sikumbang Nusantara		
35	PT. Armindo Jaya Tour				
36	PT. Joy Holiday Tour and				

	Travel				
37	PT. Putra Tanjung Arafah Tour				
38	PT. Asadel Anugrah Indonesia				
39	PT. Bintang Samudera Mentawai				

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, 2018.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan tour and travel di Kota Padang dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan dan perunan jumlah perusahaan yang mendapatkan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Menurut data yang peneliti dapatkan dari DPMPTSP Kota Padang, ada 156 perusahaan *tour and travel* yang telah mendapatkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pada tahun 2014 terdapat 39 perusahaan *tour and travel* yang telah mendapatkan izin TDUP, selanjutnya pada tahun 2015 ada 23 perusahaan yang mendapatkan izin TDUP, meskipun mengalami penurunan jumlah perusahaan yang mendapat izin TDUP namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali dengan 34 perusahaan *tour and travel* yang mendapatkan izin TDUP. Dan pada tahun 2017 terdapat 33 perusahaan *tour and travel* lagi yang mendapatkan izin TDUP dan di tahun 2018 dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Agustus terdapat 27 perusahaan yang mendapatkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang.



Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, terdapat 326 usaha *tour and travel* di Kota Padang. Namun pada kenyataannya yang ditemukan peneliti dari data izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari tahun 2014-2018 hanya 156 perusahaan *tour and travel* yang memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Itu berarti terdapat 170 *tour and travel* yang tidak memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

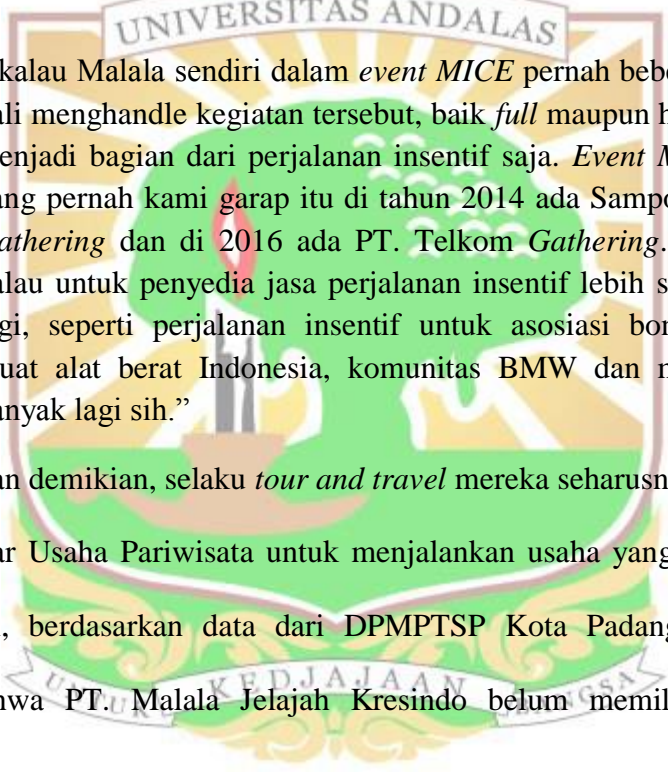


Sumber : [www.malala-tours.com](http://www.malala-tours.com) diakses pada tanggal 16 Juli 2018 pukul

11:00 WIB

Pada gambar 1.3 merupakan sounding/promosi yang dilakukan oleh PT. Malala Jelajah Kresindo yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam

bidang *tour and travel* yang memiliki andil dalam jasa penyelenggaraan PIKP sepenuhnya dan juga menyediakan jasa perjalanan insentif jika ada event PIKP yang diselenggarakan oleh PCO/EO. PT. Malala Jelajah Kresindo berdiri pada tahun 2014 dan sudah beberapa kali menjadi bagian dari penyelenggaraan PIKP di Kota Padang. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Dammara Fajar selaku pimpinan PT. Malala Jelajah Kresindo mengenai *event* PIKP yang pernah PT. Malala Jelajah Kresindo selenggarakan<sup>8</sup> :



“ kalau Malala sendiri dalam *event MICE* pernah beberapa kali menghandle kegiatan tersebut, baik *full* maupun hanya menjadi bagian dari perjalanan insentif saja. *Event MICE* yang pernah kami garap itu di tahun 2014 ada Sampoerna *Gathering* dan di 2016 ada PT. Telkom *Gathering*. Nah kalau untuk penyedia jasa perjalanan insentif lebih sering lagi, seperti perjalanan insentif untuk asosiasi bongkar muat alat berat Indonesia, komunitas BMW dan masih banyak lagi sih.”

Dengan demikian, selaku *tour and travel* mereka seharusnya memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk menjalankan usaha yang mereka miliki. Akan tetapi, berdasarkan data dari DPMPTSP Kota Padang yang peneliti himpun bahwa PT. Malala Jelajah Kresindo belum memiliki izin TDUP tersebut.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Dammara Fajar pimpinan PT. Malala Jelajah Kresindo. Tanggal 19 Juli 2018. Pukul 16:00 WIB

Lalu mengenai izin TDUP PT. Malala Jelajah Kresindo mengaku masih dalam tahap proses pengurusan kelengkapan berkas. Hal tersebut disampaikan oleh Dammara Fajar selaku pimpinan PT. Malala Jelajah Kresindo<sup>9</sup> :

“kalau TDUP kami masih proses ngelengkapin berkas sih dari tahun 2017 belum beres-beres. Tau sih itu penting tapi ya mau gimana proses dari notaris juga jadi penghambat dari internal kami nya, trus juga kalo udah urusan sama pemerintahan biasanya ribet dan lama. Tapi secepatnya ya bakal diurus biar kedepan gak ada masalah”

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang sebagai implementor harus mampu mengendalikan perilaku pengusaha atau perusahaan agar mengikuti aturan yang terdapat dalam Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Apabila semakin maraknya pelanggaran, maka harus ada tindak lanjut ataupun langkah cepat yang dilakukan DPMPTSP dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang sebagai OPD Teknis terkait untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha selaku target group dari kebijakan tersebut, sehingga terciptanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata. Namun kenyataannya, berbeda dengan yang seharusnya.

Terkait dengan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh implementor dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada, Dinas Penanaman Modal dan

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Dammara Fajar pimpinan PT. Malala Jelajah Kresindo. Tanggal 19 Juli 2018. Pukul 16:00 WIB

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dalam hal ini pengusaha bidang pariwisata, baik yang usahanya berdiri dari sebelum Perda TDUP di sah kan maupun setelah Perda TDUP sudah di sah kan. Namun ternyata sosialisasi khusus TDUP belum pernah dilakukan oleh DPMPTSP Kota Padang maupun Disparbud Kota Padang.

Berikut wawancara peneliti dengan Spero Meilyora, S.Sos. M.Si selaku Kabid Administrasi Perizinan dan Pengaduan DPMPTSP Kota Padang mengatakan: <sup>10</sup>

“kami sudah melakukan upaya-upaya terkait meningkatkan kesadaran masyarakat, kami juga mengadakan sosialisasi disetiap bulannya ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Padang. Tapi khusus untuk perusahaan atau pengusaha bidang pariwisata kami belum pernah lakukan sosialisasi terkait TDUP.”

Namun terkait dengan sosialisasi tersebut, hal ini juga dibenarkan oleh Edral Pratama, ST. MSc selaku Kasi Usaha dan Industri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang yang mengatakan :<sup>11</sup>

“iya memang benar kalau sosialisasi TDUP ini belum pernah kami lakukan langsung kepada perusahaan maupun pengusaha pariwisata, insyaAllah kedepannya akan kami laksanakan sosialisasi tersebut.”

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Spero Meilyora, S.Sos. M,Si selaku Kabid Administrasi Perizinan dan Pengaduan DPMPTSP Kota Padang. Tanggal 7 Mei 2018. Pukul 09:00

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Edral Pratama, ST. MSc selaku Kasi Usaha dan Industri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Tanggal 10 Mei 2018. Pukul 11:30 WIB



Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sosialisasi terkait Izin TDUP belum pernah dilakukan oleh DPMPTSP Kota Padang maupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang sebagai SKPD terkait.

Selain sosialisasi yang harus dilakukan terkait Perda Kota Padang No. 5 Tahun 2012, di dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 81 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja DPMPTSP Kota Padang, pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa Bidang Administrasi Perizinan dan Pengaduan DPMPTSP Kota Padang mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan keliling kecamatan dan atau tempat/keramaian dalam rangka mengoptimalkan cakupan layanan perizinan dan nonperizinan.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Spero Meilyora, S.sos, M.si selaku Kabid Administrasi Perizinan dan Pengaduan mengenai pelayanan keliling yang seharusnya diadakan oleh DPMPTSP Kota Padang<sup>12</sup> :

“kalau dalam bentuk pelayanan keliling kami belum laksanakan, baru hanya sampai sosialisasi saja ke beberapa kecamatan di Kota Padang disetiap bulannya. Belum sampai kesana layanan yang kami berikan.”

Hal ini juga mengindikasikan bahwa ada tugas, fungsi, dan tata kerja DPMPTSP Kota Padang yang ternyata belum sepenuhnya dijalankan oleh implementor.

Terkait dengan hal kelengkapan dalam proses pendaftaran perusahaan untuk mendapatkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, maka pengusaha harus

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Spero Meilyora, S.sos, M.si selaku Kabid Adm Perizinan dan Pengaduan. Tanggal 7 Mei 2018 Pukul 09:15 WIB

melengkapi berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pihak DPMPTSP Kota Padang. Setelah berkas dilengkapi oleh pemohon maka pihak DPMPTSP wajib melakukan pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana yang terdapat pada pasal 40 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 bahwa DPMPTSP sebagai OPD yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata harus memberitahukan kepada pemohon jika terdapat kekurangan berkas yang harus dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemohon pendaftaran usaha pariwisata diterima oleh pihak DPMPTSP. Dalam hal ini pihak DPMPTSP Kota Padang melalui Bidang Administrasi Perizinan dan Pengaduan (Seksi Administrasi Perizinan) yang mengurus dalam pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Arwil Kartini, S.Pt selaku Kasi Administrasi Perizinan<sup>13</sup> :

“kalau saya kan bidangnya *handle* untuk administrasi perizinan, setelah berkas kami terima dari *front office*, setelah itu kami lakukan pengecheck an apakah berkas yang kami terima ini sudah lengkap atau belum, apakah berkas tersebut benar dan absah dari perusahaan yang menjadi pemohon. Kalau sesuai SOP, ini berlaku dalam 7(tujuh) hari jam kerja setelah dinyatakan berkas valid atau tidaknya. Kalau tidak, biasanya kami langsung menghubungi pemohon untuk segera melengkapi berkas yang kurang dan yang salah. Tapi kadang, dari pihak perusahaan yang sering mengulur waktu untuk melengkapi berkas yang masih kurang tersebut.”

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Arwil Kartini, S.Pt selaku Kasi Administrasi Perizinan. Tanggal 24 Juli 2018. Pukul 15:30 WIB

Dapat dikatakan dalam hal ini pihak DPMPTSP sudah menjalankan tugasnya dalam proses pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dengan baik, akan tetapi menurut hasil wawancara tersebut yang menjadi sedikit kendala adalah pemohon yang sudah mendapatkan informasi mengenai kelengkapan berkas yang kurang, namun cenderung mengulur waktu dalam memenuhi kelengkapan berkas tersebut.

Setelah berkas diajukan pemohon dinyatakan lengkap, benar dan absah, maka pihak DPMPTSP Kota Padang dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 harus mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Lalu sesuai dengan SOP izin TDUP yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Padang bahwa perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis diberikan oleh OPD teknis terkait (dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang) melakukan peninjauan lapangan. Setelah peninjauan ke lapangan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang memberikan rekomendasi teknis kelengkapan usaha paling lambat (2) dua hari kerja sesuai dengan SOP Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata DPMPTSP Kota Padang.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasi Usaha dan Kasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang<sup>14</sup>:

“iya kami memiliki tugas untuk melakukan peninjauan lapangan bersama OPD teknis terkait dengan kesesuaian data di dalam berkas pemohon dengan usaha yang sedang dijalankan di lapangan, kalau dianggap sesuai dan tidak melanggar apapun ya sudah kami akan memberikan rekomendasi teknis kepada DPMPTSP Kota Padang untuk dapat mengeluarkan izin TDUP nya.”

Namun yang menjadi kendala adalah ketidaksesuaian waktu yang terdapat di SOP yang sudah ditetapkan dan hal ini juga diatur di dalam Perwako Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 28 ayat 4 menyebutkan :

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan paling lama 2(dua) hari kerja oleh SKPD teknis ke BPMPTSP.

Hal ini diungkapkan oleh staf DPMPTSP Kota Padang untuk mengeluarkan<sup>15</sup> :

“biasanya surat rekomendasi teknis dari Disparbud ini nih yang lama sekali, bisa sampai berbulan-bulan, paling lama pernah sampai 2 (dua) bulan barulah rekomendasi tersebut diserahkan kepada kami, itulah yang menjadi kendala kadang pemohon mengeluhkan hal itu kenapa izinnnya keluar lama sekali. Dan waktu itu sudah pernah kami berikan surat peringatan sebanyak 2 kali karena rekomendasi yang dikeluarkan cukup lama.”

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Edral Pratama, ST. Msc selaku Kasi Usaha dan Industri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Tanggal 17 Juli 2018 Pukul 10:00 WIB

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Septa Wardhana, SE. MM selaku Kabid Perizinan Kesra dan Lingkungan DPMPTSP Kota Padang. Tanggal 17 Juli 2018. Pukul 14:00 WIB

Hal tersebut juga pada akhirnya berakibat pada penerbitan tanda daftar usaha pariwisata yang terdapat dalam Perda No. 5 Tahun 2012 Pasal 55 bahwa Walikota atau dalam hal ini DPMPTSP Kota Padang berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lama 3(tiga) hari kerja setelah pencantuman dalam Daftar Usaha Pariwisata. Terkait dengan jangka waktu yang telah ditentukan, di dalam Perwako Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 30 jangka waktu proses perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yaitu 14 hari kerja, dan itu hanya berlaku jika persyaratan administrasi dan secara teknis sudah memenuhi syarat dan lengkap.

Namun yang terjadi semua proses sampai diterbitkannya izin TDUP memakan waktu lebih dari 3 (tiga) hari dikarenakan menunggu rekomendasi teknis dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, pihak DPMPTSP mengatakan proses tersebut bisa sampai berbulan-bulan lamanya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kasi Usaha dan Industri Disparbud Kota Padang :

“ada beberapa kendala yang kami hadapi untuk mengeluarkan rekomendasi teknis ini secara *on time*, kendala dari internal maupun dari si pemohon itu tadi.”

Dengan demikian, dari beberapa gejala atau fenomena yang telah dipaparkan diatas, peneliti pun tertarik untuk membahas tentang evaluasi implementasi kebijakan pemberian tanda daftar usaha pariwisata (bidang usaha PCO/EO dan *Tour and Travel*) di Kota Padang. Peneliti ingin melihat



bagaimana proses penerbitan tanda daftar usaha pariwisata serta kendala yang dihadapi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang ada pada latar belakang dan bagaimana permasalahan yang terjadi maka peneliti merumuskan permasalahannya yakni :  
Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pemberian tanda daftar usaha pariwisata (bidang usaha *PCO/EO* dan *Tour and Travel*) di Kota Padang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

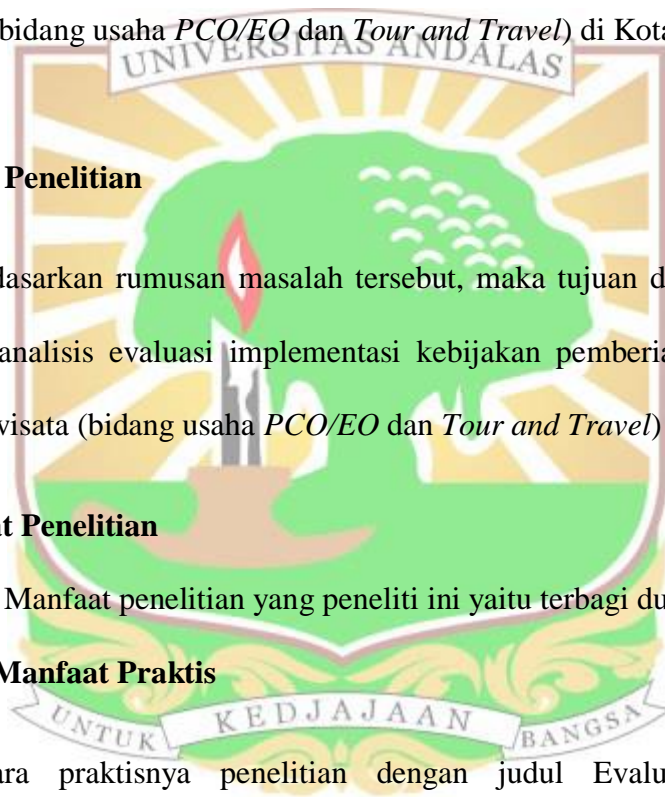
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis evaluasi implementasi kebijakan pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata (bidang usaha *PCO/EO* dan *Tour and Travel*) di Kota Padang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang peneliti ini yaitu terbagi dua:

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Secara praktisnya penelitian dengan judul Evaluasi Implemensi Kebijakan Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata (bidang usaha *PCO/EO* dan *Tour and Travel*) di Kota Padang diharapkan dapat memberikan masukan, acuan dan sumbangan pikiran pada instansi yang bersangkutan, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang terkait implementasi dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi publik dan meningkatkan kinerja pemerintah di dinas tersebut.



#### 1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian dengan judul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (bidang usaha *PCO/EO* dan *Tour and Travel*) di Kota Padang berguna untuk pengembangan serta sebagai kontribusi dalam Ilmu Administrasi Publik terutama implemetasi yang dilakukan suatu organisasi publik juga sebagai rujukan penelitian yang akan datang.

